

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Tasya Adinda Pertiwi¹, Windi Aulia², Afriza³
tasyaadinda0206@gmail.com¹, windyauliashr@gmail.com², afriza@uin-suska.ac.id²
UIN Suska Riau

ABSTRAK

Pendidikan adalah salah satu ujung tombak kemajuan bangsa di masa depan. Untuk mengembangkan pendidikan nasional, perlu ada kebijakan yang dapat memajukan pendidikan. Peran kebijakan sangat penting karena membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang diperoleh melalui proses penelitian dan analisis. Kebijakan juga memisahkan dan mengklarifikasi masalah, mengungkapkan ketidaksesuaian tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru, serta mengusulkan cara-cara untuk menerjemahkan ide-ide ke dalam kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Dalam pembuatan kebijakan ini, tentunya diperlukan implementasi untuk melihat hasil dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan library reserch dari peneliatn sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam pendidikan dengan melihat tahapan-tahapan dan pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendidikan.

ABSTRACT

Education is one of the cornerstones of a nation's progress in the future to develop national education, policies that advance education are necessary the role of policy is crucial because it aids in decision-making by providing information obtained through research and analysis. Policies also separate and clarify issues, reveal inconsistencies in goals and efforts, offer new alternatives, and propose ways to translate ideas into policies that are easily implemented and realized in creating these policies, implementation is essential to observe the outcomes of the policies this study employs library research from previous studies. The purpose of this research is to analyze the implementation of educational policies by examining the stages and approaches in the implementation of education policies.

Keywords: Implementation, Policy, Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan permasalahan yang amat mendesak bagi negara ini. Sebab pendidikan merupakan sarana penting untuk menciptakan peningkatan jumlah sumber daya manusia yang dapat mewujudkan seluruh potensi dirinya dan mengelolanya secara optimal dan rasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membangun sistem pendidikan guna meningkatkan sistem sosial yang berwibawa dan tangguh, serta memantapkan warga negara Indonesia yang terampil dan proaktif dalam menyelesaikan tantangan sosial dan perubahan zaman. Kebijakan pendidikan merupakan bagian integral dari ranah kebijakan publik, di mana keputusan diambil secara langsung oleh pihak yang berwenang. Kebijakan publik sendiri mencakup keputusan-keputusan yang dibuat untuk mengelola dan mengatur sumber daya yang tersedia demi kepentingan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memastikan pemanfaatan optimal dari berbagai sumber daya guna memberikan manfaat yang maksimal kepada seluruh warga negara. Munculnya suatu kebijakan seringkali dipicu oleh adanya permasalahan yang menjadi latar belakang dari pembuatan kebijakan tersebut. Pada umumnya, kebijakan dibuat sebagai respons

terhadap tantangan atau situasi yang memerlukan tindakan khusus serta kebijakan tersebut menjadi suatu kebijakan yang merespon suatu permasalahan yang ada.

Kebijakan adalah keputusan yang diambil dengan cara demikian oleh suatu badan negara yang berwenang, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kebijakan ini dibuat bertujuan untuk melaksanakan tujuan nasional. Yang dimaksud dengan kebijakan disini adalah kebijakan yang diambil dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga untuk memajukan masyarakat maka pemerintah berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga seperti itu artinya dapat ditentukan. Secara umum dan keseluruhan. Kebijakan yang baik didasarkan pada undang-undang yang jelas, sehingga memberikan manfaat bagi banyak orang dan tidak merugikan. Implementasi kebijakan pendidikan menjadi penting karena baik kebijakan yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Setelah suatu kebijakan pendidikan dilaksanakan maka dapat dilakukan tahap evaluasi untuk mengkaji hasil dari kebijakan yang dilaksanakan tersebut. Selama implementasi, perhatian juga harus diberikan pada tahapan dan prosedur pelaksanaan langkah-langkah kebijakan pendidikan.

Tujuan dilakukannya implementasi adalah untuk memberikan arahan agar tujuan kebijakan dapat terwujud. Elemen terpenting dalam kebijakan adalah implementasi. Proses implementasi kebijakan merupakan elemen akhir yang sangat penting bagi keseluruhan pengembangan kebijakan. Sebagus apapun perencanaan dan pengembangan kebijakan dilakukan, tidak akan ada artinya jika proses implementasinya tidak dapat dipertahankan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah teknik penelitian pustaka. Kajian pustaka merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pengetahuan. Informasi yang digunakan untuk menyelesaikan artikel ini berasal dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan Pendidikan merupakan permasalahan yang amat mendesak bagi negara ini. Sebab pendidikan merupakan sarana penting untuk menciptakan peningkatan jumlah sumber daya manusia yang dapat mewujudkan seluruh potensi dirinya dan mengelolanya secara optimal dan rasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membangun sistem pendidikan guna meningkatkan sistem sosial yang berwibawa dan tangguh, serta memantapkan warga negara Indonesia yang terampil dan proaktif dalam menyelesaikan tantangan sosial dan perubahan zaman. Menurut Winarno yang dikutip oleh Muhammad Munadi dan Barnawi dalam M. Solichin kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah dan dipengaruhi oleh aktor dan faktor non-negara. Kebijakan pendidikan merupakan bagian integral dari ranah kebijakan publik, di mana keputusan diambil secara langsung oleh pihak yang berwenang.

Kebijakan publik sendiri mencakup keputusan-keputusan yang dibuat untuk mengelola dan mengatur sumber daya yang tersedia demi kepentingan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memastikan pemanfaatan optimal dari berbagai sumber daya guna memberikan manfaat yang maksimal kepada seluruh warga negara. Munculnya suatu kebijakan seringkali dipicu oleh adanya permasalahan yang menjadi latar belakang dari pembuatan kebijakan tersebut. Pada umumnya, kebijakan dibuat sebagai respons

terhadap tantangan atau situasi yang memerlukan tindakan khusus serta kebijakan tersebut menjadi suatu kebijakan yang merespon suatu permasalahan yang ada. Menurut Nanang Fatah dalam Asyiah dkk, ada tiga unsur kebijakan aktor kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik. Aktor politik, seperti organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, partai politik, lembaga pemerintah, pemimpin terpilih, dan analisis kebijakan itu sendiri, yaitu konteks tertentu di mana peristiwa seputar isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan juga terkena dampak Pembuat kebijakan. Hal ini melibatkan proses dialektis, yang berarti bahwa aspek obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan sebenarnya saling terkait erat. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar para pelaku kebijakan.

2. Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan

Manajemen pendidikan yang terdesentralisasi di Indonesia Memungkinkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan elemen pemerintah pusat dan daerah, serta memfasilitasi koordinasi yang efektif antara tingkatan pemerintahan tersebut. Dalam proses pendidikan, tenaga kependidikan diberikan kesempatan dan kewenangan, serta masyarakat setempat berperan aktif dalam pengembangan lebih lanjut lembaga pendidikan (sekolah). Praktik kebijakan pendidikan digambarkan dalam suatu bentuk manajemen yang disebut manajemen berbasis sekolah. Sistem MBS ini memberikan sekolah dan pemangku kepentingan kemampuan untuk mengelola sekolahnya. Oleh karena itu, meskipun konsep pengelolaannya bersifat desentralisasi, namun perlu diketahui strategi pengelolaan pendidikan terpadu di sekolah. Fase-fase tersebut adalah:

a) Tahap Sosialisasi

Fase sosialisasi merupakan fase yang penting karena memerlukan pemerataan kebijakan di setiap lokasi. Penyampaian informasi dapat terjadi melalui platform daring maupun luring. Proses ini mencakup penyebaran data atau pesan baik secara elektronik di internet maupun melalui saluran konvensional di dunia nyata. Tantangan pada tahap sosialisasi ini adalah masyarakat sulit menerima perubahan dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari perubahan kebijakan ini, aspek-aspek seperti tujuan, manusia (individu), lingkungan, proses, hasil (output), dan kebiasaan atau rutinitas perlu dipertimbangkan.

b) Tahap Pilotting

Fase percontohan ini bertujuan untuk mengurangi dampak eksperimen kebijakan dan membutuhkan uji coba. Model eksperimental ini memenuhi persyaratan penerimaan, akuntabilitas, reproduktifitas, dan keberlanjutan.

c) Tahap Deseminasi

Fase diseminasi adalah fase di mana pedoman yang telah ditetapkan disebarluaskan. Perlu diketahui bahwa tahap sosialisasi ini memerlukan peralatan yang banyak dan anggaran yang besar.

Ketiga tahapan ini perlu dikembangkan agar kebijakan yang telah dihasilkan dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

3. Hambatan Dan Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Peter dalam Yasmi mengatakan hambatan penerapan kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Kurangnya informasi ini menciptakan gambaran yang tidak akurat tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam kebijakan tersebut. Gambaran yang tidak jelas ini mempunyai implikasi negatif terhadap tujuan kebijakan, isi kebijakan yang

dilaksanakan, dan pelaksana hasil kebijakan. Hal ini menghindari kesalahpahaman dan menyeimbangkan persepsi kedua belah pihak.

- b. Isi kebijakannya tidak jelas, atau tidak solid. Isi atau tujuan kebijakan belum jelas, kebijakan itu sendiri mempunyai ketidakakuratan internal atau eksternal yang menunjukkan kelemahan yang sangat serius atau berdampak pada sumber daya, implementasi kebijakan mungkin gagal.
- c. Kurangnya dukungan terhadap implementasi kebijakan. Tanpa dukungan yang memadai terhadap suatu kebijakan pada saat implementasi, maka akan sangat sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian kemampuan/ potensi adalah pembedaan tugas dan kemampuan para pelaku pelaksana pedoman.

Pada prinsipnya indikator kinerja penilaian pencapaian standar dan tujuan Pedoman dapat dijelaskan dengan adanya kegiatan yang berpindah dari level Pedoman dan masih berupa dokumen peraturan. Standar dan tujuan menunjukkan seberapa sukses program.

Ripley dan Franklin, dalam bukunya yang berjudul *Bureaucracy and Policy Implementation (Implementasi Kebijakan dan Birokrasi)*, yang dikutip Lukitasari dkk, menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program bertujuan pada tiga elemen yaitu:

- a. Perspektif kepatuhan (compliance), ukur status kepatuhan kepada pimpinan.
- b. Keberhasilan pelaksanaan diukur dari kelancaran rutinitas atau kebiasaan dan tidak adanya kesalahan.
- c. Penerapan yang sukses akan menghasilkan layanan yang memuaskan semua pihak yang terlibat, khususnya fokus pada kelompok penerima manfaat yang menjadi target.

Sederhananya, ketiga faktor tersebut di atas memberikan kepastian dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga tidak adanya atau hilangnya salah satu faktor tersebut akan berdampak signifikan terhadap kinerja kebijakan.

Sebaliknya, Merce dalam Oktavia dkk, mengatakan ada faktor yang dapat menyebabkan kegagalan serta menjadi tantangan implementasi kebijakan.

- a. Isi kebijakan harus jelas, tidak ambigu, dan memuat isi kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Implementasi kebijakan bisa gagal karena tidak jelasnya isi dan tujuan kebijakan, dan secara internal karena kebijakan itu sendiri tidak jelas atau tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya pendukung tidak mencukupi.
- b. Informasi yang hilang dapat dengan mudah memberikan gambaran yang tidak akurat mengenai subjek kebijakan dan isi kebijakan yang diterapkan serta orang yang melaksanakan hasil kebijakan.
- c. Mendukung, tanpa dukungan yang memadai terhadap kebijakan publik, implementasi kebijakan publik akan sangat sulit. Dukungan ini bisa bersifat fisik maupun non fisik. Dukungan ini juga berkaitan dengan partisipasi komunitas dalam implementasi pedoman.
- d. Potensi berbagi. Pada hakikatnya hal ini berkaitan dengan kinerja koordinasi masyarakat luas. Masing-masing pelaku mempunyai latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda sehingga diperlukan koordinasi. Koordinasi adalah tempat pertemuan dan pusat keberhasilan Pedoman.

KESIMPULAN

Dari tinjauan literatur yang dilakukan, kebijakan pendidikan diartikan sebagai keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Perumusan kebijakan pendidikan memerlukan pertimbangan informasi kebijakan, metode pengumpulan informasi, argumentasi, dan bentuk analisis kebijakan. Agar suatu Petunjuk dapat diterapkan dengan baik, diperlukan suatu fase implementasi, yang terdiri dari fase sosialisasi, fase percontohan, dan fase diseminasi. Agar suatu kebijakan dapat memenuhi harapan, setiap tahapan harus dilaksanakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyiah, Siti, and M Fachri Adnan. "Adil Mubarak" (2013): 1–9.
- Chariri, M C. "Analisis Kebijakan Lembaga Akreditasi Sekolah/Madrasah." *Academia.Edu* (2021).
https://www.academia.edu/download/88836723/analisis_kebijakan_lembaga_akreditasi.pdf.
- Durrotunnisa, and Hanita Ratna Nur. "Jurnal Basicedu. Jurnal Basicedu,." *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (2020): 3(2), 524–532. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>.
- Lukitasari, Sasadara Wahyu, Bambang Suteng Sulasmono, and Ade Iriani. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (2017): 121.
- Oktavia, Linda Sari, Nurhidayati Nurhidayati, and Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses Dan Strategi." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 95.
- Solichin, M. "Imlementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi." *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 148–178.
- Ulfah, Utami. "Peran Trait Mindfulness Terhadap Regulasi Emosi Pada Remaja Panti Asuhan Serta Tinjauan Dalam Islam" 4 (2018): 9.
- Yasmi, Milma. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan." *Spirit Publik* 4 (2008): 215–228.
https://www.academia.edu/3157195/Evaluasi_Implementasi_Kebijakan_Pendidikan_Sistem_Ganda_Di_sekolah_Kejuruan.